

KAMIS, 5 JANUARI 2017

## TAJUK RENCANA

## Melawan Kejahatan Dunia Maya

Berbagai bentuk kejahatan di dunia maya telah menjadi kecenderungan yang meresahkan. Perkembangan internet dan media sosial bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Namun sebaliknya juga bisa berdampak negatif. Dunia maya sangat rawan dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang di dalamnya bisa bertendensi negatif seperti menyebarkan kebencian atau menyulut radikalisme. Dunia maya seperti sebuah ruang bebas tanpa ada yang bisa mengendalikannya.

Tekad Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk fokus mencegah kejahatan melalui dunia maya tentu sangat didukung oleh masyarakat. Bahkan selama ini kita sudah menunggu langkah-langkah aparat untuk melawan kejahatan di dunia maya. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjadi perangkat hukum, namun tindakan riil dan cepat aparat kepolisian untuk menelusuri penyebar berita bohong belum banyak dilakukan. Jadilah *hoax* begitu cepat menyebar karena seolah dibiarkan begitu saja.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji tahun ini akan fokus pada masalah tersebut. Namun diingatkan bahwa yang lebih penting dilakukan adalah kesadaran masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap *hoax* dan itulah bentuk perlawanan yang lebih efektif di samping penegakan hukum. Dari konteks ini kita melihat tugas itu tidak mungkin hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Menjadi tanggung jawab bersama untuk melawan arus informasi yang sangat berbahaya ini.

## Pemutusan Kontrak terhadap JP Morgan

Keputusan mengejutkan dibuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kementerian Keuangan memutuskan mencoret JP Morgan Chase and Co dari daftar mitra kerjanya. Hasil riset yang dibuat oleh lembaga yang terafiliasi dengan perusahaan keuangan ternama itu dinilai tidak akurat dan tidak kredibel. Riset merupakan aktivitas reguler yang dilakukan oleh lembaga keuangan, apalagi bila layanan yang diberikan sangat lengkap. Kelengkapan itu terwujud berkat struktur perusahaan yang membentuk grup.

Bagaimana pun negara harus hadir dan tak boleh tinggal diam. Penyebarluasan berita bohong bukan hanya menyesatkan, namun sudah berisiko tinggi ketika mulai memengaruhi sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi kalau sudah menyangkut isu SARA. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya motif-motif politik di belakangnya. Maka hal itu jelas sangat destruktif dan kontraproduktif. Dari sisi inilah kita mendesak langkah-langkah antisipasi yang sangat cepat dan tepat.

Salah satu yang segera dilakukan adalah pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) yang akan memproteksi seluruh kegiatan siber nasional termasuk mengatasi penyebaran berita bohong yang sudah sangat memprihatinkan. Menurut Menko Polhukam Wiranto badan baru itu akan mengkoordinasikan badan *cyber defence* di Kementerian Pertahanan, *cyber intelligence* Badan Intelijen Negara (BIN) dan *cyber security* Polri. Dengan demikian badan tersebut diharapkan lebih *powerful* dan efektif.

Namun berbagai bentuk proteksi akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Karena ada hal yang sangat fundamental terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Maka semua langkah yang dilakukan haruslah tetap terukur dan tidak asal-asalan. Sebenarnya jelas bisa dibedakan mana yang dapat dikategorikan kejahatan dan mana yang tidak. Artinya tak perlu ada keraguan untuk menindak. Di mana pun yang namanya kebebasan harus tunduk pada hukum dan etika.

Terdapat tiga level penilaian. Level tertinggi adalah *overweight*. Setikit di bawah itu disebut normal atau netral. Sering juga dipakai istilah *hold* untuk level kedua ini. Sedangkan level terendah adalah *underweight*, yang bisa dipersepsikan sebagai perintah menjual atau mengurangi bobot kepemilikan pada saham-saham emiten di Bursa Efek Indonesia. Rekomendasi itu dianggap memberi pengaruh psikologis, yang bisa berdampak pada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pasar modal memang digerakkan

## Mencegah Terorisme dari Desa

Oleh Riza Multazam Luthfy



SAAT ini, para pelaku teror di Indonesia berusaha membangun kekuatan di wilayah pedalaman. Mereka menjadikan desa sebagai basis untuk melakukan konsolidasi, menyiapkan amunisi, serta membangun strategi.

Penggerebekan rumah terduga teroris di Desa Ajibaho, Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, oleh personel Densus 88 Antiteror Polri merupakan salah satu bukti bahwa desa menjadi lokasi strategis bagi teroris guna menghilangkan jejak, sekaligus menyusun rencana matang sebelum beraksi. Dipilihnya desa sebagai basis aktivitas teror bukan tanpa dasar. Mereka memahami sosiologi perdesaan yang genap mengalami pergeseran.

Dahulu kala, orang desa selalu menunjukkan kecurigaan terhadap orang asing. Mereka menampilkan ekspresi "tidak suka" saat melihat orang luar datang ke wilayahnya. Muncul ketidaknyamanan ketika loka mukim mereka tiba-tiba dikunjungi oleh orang atau kelompok tak dikenal. Meskipun terkesan negatif, sebenarnya kecurigaan merupakan wujud perhatian lebih terhadap kehidupan orang lain. Sikap ini menjadi modal besar bagi negara dalam menguak kasus-kasus terorisme. Berbekal kecurigaan, keberadaan para teroris yang lari ke pedalaman bisa terlacak. Orang desa dapat berperan dalam mengendus siapa saja yang berusaha menggalang aksi terorisme.

## Geliat Modernisasi

Kala modernisasi mulai menyentuh wilayah perdesaan, kecurigaan ini semakin lama semakin luntur. Merosotnya kecurigaan orang desa lantaran budaya urban memengaruhi pola dan cara berpikir mereka. Kecurigaan perlahan tergerus oleh prinsip hidup perkotaan yang cenderung egoistis. Kepedulian yang awalnya juga mencakup kehidupan orang lain, akhirnya dicurahkan kepada diri sendiri. Globalisasi membuat beragam nilai dari luar masuk ke desa dan menciptakan psikologi, sosiologi, serta gaya hidup masyarakat.

Gejala menguatnya nilai-nilai urban pada diri orang desa dikokohkan oleh pendidikan. Abdul Munir Mul Khan (2009: 94) melihat bahwa melalui pendidikan, modernisasi menelusup pada kehidupan perdesaan. Banyak anak desa yang merantau ke kota demi memasuki berbagai lembaga pendidikan modern. Saat menempuh jenjang pendidikan inilah, mereka bersentuhan dengan prinsip hidup orang kota.

Bersarangnya budaya urban ke wilayah perdesaan juga dipengaruhi oleh gelombang urbanisasi. Hasrat urban mem-

bimbing pemuda desa untuk berburu rupiah ke kota. Daripada menjadi petani, anak muda masa kini lebih terobsesi sebagai buruh. Muncul kepuasan tersendiri ketika mereka melepaskan identitas tradisional dan mulai disebut orang kota.

Pertukaran antara nilai-nilai desa dengan kota berlangsung pada waktu mereka bekerja. Saat mereka kembali ke tanah kelahiran, nilai inilah yang ditularkan kepada warga desa lain.

Pendidikan dan urbanisasi seolah berorientasi pada pembentukan manusia egoistis. Kultur urban yang diselipkan lewat keduanya cenderung membentuk kepribadian keras, kasar, dan sukar diatur. Akibatnya, semangat dan etos kerja orang desa yang dihiasi dengan komunalisme hilang tergantikan individualisme. Padahal, selama komunalisme masih dipegang teguh oleh orang desa,

kepedulian terhadap sesama akan tetap terpelihara. Begitu pula sebaliknya.

Pemerintah desa semestinya lebih selektif saat menerima orang luar. Ketua RT dituntut mengetahui latar belakang dan sepak terjang siapa saja yang menjadi tamu dan warga baru. Di sinilah urgensi buku induk desa yang memuat sejumlah data penting, termasuk identitas penduduk tetap dan sementara. Selain merealisasikan tertib administrasi pemerintahan, langkah ini juga merupakan upaya menjauhkan desa dari anasir terorisme.

Untuk menanggulangi aksi terorisme, kepala desa beserta pamong lain harus menggendong semua lapisan masyarakat. Egosentrisme dan individualisme yang terlanjur meracuni kawula muda diatasi dengan cara melibatkan mereka dalam ruang publik. Motivasi gotong royong yang dimiliki golongan tua diarahkan pada usaha

mewujudkan *good governance* di desa.

Sebagai upaya memutus jaringan terorisme, warga diajak untuk aktif dalam melakukan kontrol sosial. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, mereka dapat segera melaporkannya kepada aparat desa. Dalam konteks inilah, berlangsung apa yang disebut dengan demokrasi deliberatif, di mana demokrasi tidak hanya dijalankan oleh kaum elite (pemimpin dan tokoh desa), melainkan juga warga desa.

Kontrol sosial merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa. Said (dalam Samsul Komar, 2003) menjelaskan bahwa kontrol sosial dalam khasanah perdesaan merupakan alat pengawasan warga desa terhadap segala bentuk interaksi dan hubungan sosial. Di sinilah pentingnya melekatkan desa sebagai benteng sosial pencegahan terorisme. (43)

— Riza Multazam Luthfy, peneliti desa, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta

